

PENGINTEGRASIAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM)

Oleh:
IYANSEP
NIM. E21110050

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Email: Selvinusyan1992@Gmail.Com

ABSTRAK

Artikel ini merupakan salah satu bagian dari skripsi penulis yang berjudul Pengintegrasian Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Adapun yang menjadi permasalahan yaitu Masalah Pendataan, Masalah Koordinasi dan Masalah pembagian tugas. Selain itu, penulis menggunakan model George C Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) yang mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan Program BLSM yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Kurang Efektifnya Pengintegrasian Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar penerima BLSM adapun yang terdaftar sebanyak 1.164 orang yaitu dilihat dari: Komunikasi dalam implementasi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Batu Layang sangat disayangkan tidak berjalan dengan efektif, efisien dan tidak tepat sasaran. Kemampuan sumber daya dilihat dari jumlah staf secara umum belum tersedia dengan maksimal. Kecenderungan sikap implementor dan target group sudah dapat dikatakan cukup baik, terlihat dari dukungan kepala Kelurahan dan staf-staf beserta masyarakat di Kelurahan Batu Layang untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dengan efektif dan efisien. Pembagian tugas dalam struktur birokrasi Kelurahan Batu Layang sudah cukup jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rekomendasinya adalah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, perlu membangun koordinasi yang baik dengan menjalin kerjasama. Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, perlu mengusulkan penambahan anggaran karena untuk memenuhi semua sumber daya diperlukan anggaran yang cukup dan penambahan jumlah staf. Selain itu juga, perlu adanya penambahan fasilitas. Sikap harapan dan dukungan dari pada implementor dan target sasaran perlu ditingkatkan lagi. Dan Pembagian tugas kepada pihak Kelurahan Batu Layang harus jelas dan tegas karena Kelurahan Batu Layang memiliki perangkat RT dan RW yang dapat melakukan kerjasama pendataan dilapangan.

Kata-kata Kunci: Pengintegrasian, Program, BLSM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mendukung kesejahteraan merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai dan diberikan kepada kelompok masyarakat miskin di Kelurahan Batu Layang, sebagai jaminan bahwa setiap masyarakat miskin yang memiliki pendapatan minimum berhak untuk memperoleh bantuan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya .

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan akibat dari pengaruh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebelumnya 4.500 per liter menjadi 6.500 per liter adalah dengan mengeluarkan kebijakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Miskin (BLSM), pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan perangkat daerah seperti Kelurahan, RT dan RW. BLSM ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat melalui menteri dalam negeri yang mengeluarkan instruksi kepada Walikota untuk melaksanakan

program BLSM pada tingkat Kelurahan.

Kelurahan Batu Layang memiliki 4 bidang pelayanan pemerintahan yang menangani pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, adapun bidang-bidang pelayanan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pemerintahan
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- d. Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

Berdasarkan Instruksi Mendagri No. 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Program jangka pendek yang dilaksanakan pemerintah adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Melalui program ini, pemerintah memberikan dana tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan. Agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

BLSM diberikan dalam jangka waktu empat bulan dengan besaran bantuan senilai Rp. 150.000/ bulan. Sasaran program BLSM adalah Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi rendah atau miskin. BLSM diharapkan mampu membantu untuk mempertahankan daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan permasalahan pendataan tersebut, statistik tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak Kelurahan Batu Layang untuk melakukan pendataan, melainkan surat undangan yang ditujukan kepada penerima kartu perlindungan sosial (KPS) sudah diterima oleh Kelurahan Batu Layang untuk dibagikan kepada masing-masing RT dan diteruskan kepada masyarakat, dengan demikian pihak Kelurahan Batu Layang tidak dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebagai upaya memberikan informasi tentang BLSM sesuai dengan tujuan penggunaannya. Akibatnya, terdapat permasalahan rumah tangga miskin yang terdaftar di penerima Beras Miskin (Raskin) akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BLSM, hal ini merupakan

ketidaktepat sasaran dalam mengelompokkan penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Batu Layang kepada 1.164 rumah tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebesar Rp 150.000 per bulan. Penyaluran BLSM di Kelurahan Batu Layang yang diberikan kepada penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) telah disalurkan pada 2 tahap, tahap pertama di salurkan untuk 2 bulan sekaligus dengan jumlah Rp 300.000 dan tahap ke dua disalurkan untuk 2 bulan sekaligus dengan jumlah Rp 300.000, dengan demikian total BLSM yang telah diterima masyarakat pada tahun 2013 adalah berjumlah Rp 600.000. Untuk 1.164 rumah tangga penerima KPS yang sudah diundang pihak RT setempat supaya mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ke kantor pos.

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)
Pada Tahun 2013

No	Wilayah RW	Jumlah Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
1	RW 01	23
2	RW 02	61
3	RW 03	40
4	RW 04	75
5	RW 05	84
6	RW 06	53
7	RW 07	33
8	RW 08	36
9	RW 09	24
10	RW 10	27
11	RW 11	50
12	RW 12	100
13	RW 13	103
14	RW 14	80
15	RW 15	56
16	RW 16	60
17	RW 17	40
18	RW 18	49
19	RW 19	60
20	RW 20	102
Jumlah		1.164

Sumber: Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara Pada Tahun 2014. Pada Tanggal 29 Januari 2014, Pada Pukul 09:30.

Pada tabel 1.1 diatas rekapitulasi data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebanyak 1.164 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan kepada 20 RW dimasing-masing wilayah Kelurahan Batu Layang. Jumlah penerima kartu KPS terbanyak terdapat di RW 13 yang berjumlah 103 orang dan jumlah penerima paling sedikit penerima kartu KPS Terdapat Pada RW 01.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif dengan analisis data secara Kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan pada saat

penelitian dilaksanakan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Lurah Kelurahan Batu Layang.
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- c. BPS
- d. Ketua RT

Sedangkan Obyek Penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Penyaluran Program BLSM yang dilaksanakan oleh Pemerintah agar tepat sasaran. Dilihat dari aspek Pendataan, Koordinasi dan Pembagian Tugas. Peneliti memfokuskan masalah pada: Efektivitas Implementasi Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Kepada Penerima Tetap Yang Terdaftar di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.

Teknik dan alat pengumpulan data yaitu menggunakan Teknik Wawancara, Teknik Observasi Dan Teknik Dokumentasi.

Teknik analisis data yaitu menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data Dan Verifikasi.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut George C. Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah keatas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan kebawah, perlu adanya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas isi informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsisten dalam menyampaikan informasi.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

1. Transmisi
2. Kejelasan
3. Konsistensi

b. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Subarsono (2005:90) yang mengatakan bahwa kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, karena tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bila mana sumber daya yang dibutuhkan tidak memadai atau relevan. Sumber daya yang dimaksud adalah:

1. Staf
2. Informasi
3. Wewenang
4. Fasilitas.

c. Disposisi atau sikap
(*disposition or attitudes*)

Menurut Subarsono (2006:91), mengatakan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

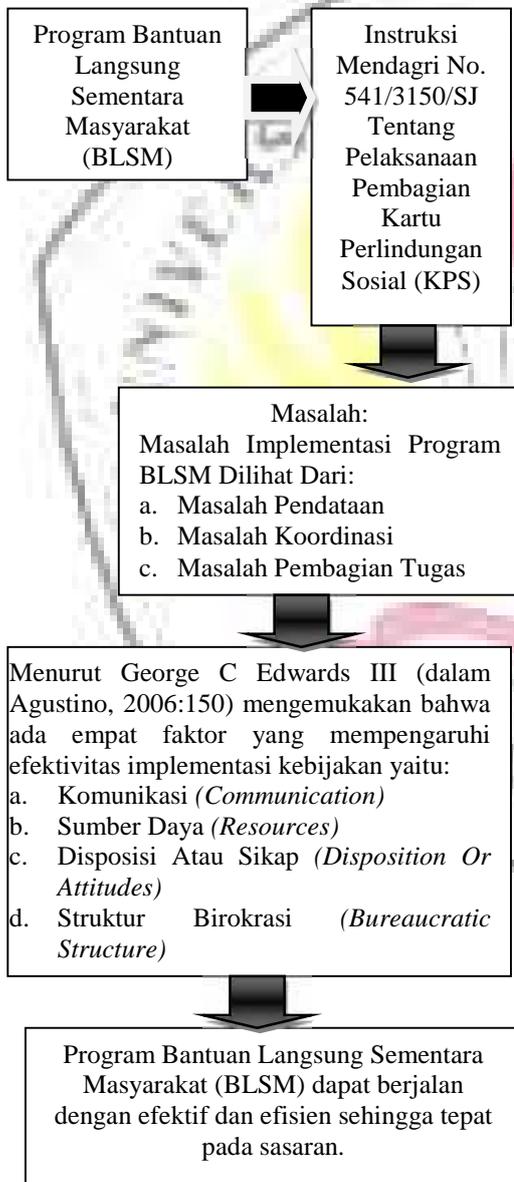
Kemudian, dalam hal ini yang terpenting adalah sikap mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan. Artinya para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan, justru sangat tergantung pada sejauh mana wewenang yang ada padanya.

d. Struktur Birokrasi
(*bureaucratic structure*)

Menurut Subarsono (2006:92), mengatakan bahwa Struktur organisasi bertugas mengimplementasikan kebijakan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Penelitian



D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari pemahaman implementasi program dan melihat permasalahan yang ada, berdasarkan keterangan yang diperoleh pada Kantor Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Seksi Pemberdayaan Masyarakat (PM) merupakan seksi yang bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat guna menunjang pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Didalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut terdapat hal-hal yang menjadi faktor menghambat dalam mencapai hasil secara efektif yang meliputi: Masalah Pendataan, Masalah Koordinasi, Dan Masalah Pembagian Tugas.

Kelurahan Batu Layang merupakan ujung tombak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat khususnya dalam melaksanakan kebijakan

program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator-indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh George C Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) yang terdiri dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Atau Sikap, Dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu: (a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miscommunication*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. (b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan tidak ambigu/

mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak elalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, paaraa pelaksana membutuhkan *fleksibilitas* dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi paada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. (c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk ditetapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Hal tersebut tentu saja menjadi permasalahan baik dari komunikasi yang dilakukan badan statistik kepada pihak Kelurahan Batu Layang untuk berkoordinasi melakukan kerjasama pendataan masyarakat miskin. Faktor komunikasi menjadi sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan program tersebut sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain bentuk komunikasi

antar pelaksana, dibutuhkan juga komunikasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat penerima program selaku target group atau kelompok sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis Kepada Kepala Lurah Batu Layang Bapak (HF) 48 tahun menyampaikan:

“ia... sebenarnya sosialisasi ini sangat kita sayangkan tidak dilibatkan pihak kelurahan ini langsung oleh pihak statistik. Itu yang kita sayangkan sebenarnya kelurahan ini kan punya perangkat yaitu RT dan RW kan. a.. seharusnya melalui kelurahan. Kelurahan itu nanti di bantu oleh RT dan RW baru tepat sasaran. A... sampai saat ini terus terang saya sebagai lurah sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Ya itu a... kalau kebijakannya dari atas itu adalah karena tanpa melalui pendataan yaitu tanpa melalui kelurahan itu yang sangat kita sesalkan, yang sangat kita sayangkan sehingga hambatannya itu ada temuan-temuan, temuannya itu yang artinya yang tidak tepat sasaran. A... tidak tepat sasaran artinya orang yang

tidak berhak mendapat justru mendapat, orang yang sangat berhak mendapat justru tidak mendapat. Yang mendapat ini justru orang yang tidak berhak mendapat itu kan sangat kita sesalkan. Mengapa? Ini kan sistemnya dari atas a... langsung ditunjuk dari statistik a... makanya a... terus terang kebijakan ini a... memang ini kebijakan pusat tapi sangat kita sayangkan tidak melalui kelurahan itu saja”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak (B) selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 45 tahun, beliau menyampaikan:

“sepengetahuan saya sosialisasinya tidak ade, ini saya pun kemaren heran, terkejut dalam arti kami pihak kelurahan langsung dapat informasi mendapat surat di kantor pos bahwa ada namanya balsem ini. A... masalah yang ini, kami pihak kelurahan melihat surat dari kantor pos ini kayak-kayak model bentuk BLT ape geto sejenis geto. Cuma kame tidak ada sosialisasi itu tidak ada langsung kantor pos memberitahu bahwa ade surat kantor pos itu mengenai

masalah balsem untuk orang-rang yang tidak mampu. A... untuk dibagikan kepadene istilah itu dagade”.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan, bahwa pemberitahuan akan adanya penyaluran dana program sebelumnya tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Melainkan pihak Kelurahan Batu Layang hanya disurati oleh pihak Kantor Pos yang berisi daftar nama masyarakat yang terdaftar menerima program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk mengambil dana tersebut di Kantor Pos, sehingga pihak Kelurahan merasa tidak mengetahui akan adanya program tersebut dan tidak merasa telah mendata masyarakat yang berhak mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Berdasarkan informasi yang diperoleh ternyata pendataan dilakukan oleh badan pusat statistik yang menunjuk 4 (empat) orang sebagai orang yang mendata masyarakat miskin. Hal ini sangat di sayangkan mengingat perangkat kerja Kelurahan yang mempunyai

RT dan RW bisa mendata masyarakat miskin tersebut.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia. Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bapak (B) 45 tahun yang menyampaikan:

“untuk kasi masih kurang staf a... minimal 1 kasi harus 2 staf, jadi sekarang 1 kasi ni 1 staf, udah tu... kadang-kadang SDM nya agik ya... an... minimal 2 lah a... sedang, mayoritasan 1 ni sedangkan kerjaan numpok”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sumber daya manusia dilihat dari jumlah staf yang dimiliki oleh Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara berjumlah 13 (tiga belas) yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris memiliki 2 (dua) staf Sekretaris, dan terdapat 4 (empat) bidang yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Seksi Ekonomi Dan Bangunan yang memiliki masing-masing 1 (satu) staf. Sedikit banyaknya jumlah staf yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan maka perlu adanya penyesuaian untuk menyamakan jumlah staf yang harus dimiliki oleh masing-masing kepala seksi supaya dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, jika implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dapat berjalan efektif dan efisien jumlah staf yang harus dimiliki oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat minimal 2 (dua) orang apabila 1 (satu) staf sibuk

mengerjakan pekerjaan lainnya terdapat 1 (satu) staf cadangan yang dapat mengerjakan pekerjaan lainnya. Dan juga staf yang dimiliki masing-masing kepala seksi minimal harus salah satu ada yang bisa mengoperasikan fasilitas komputer, sehingga jika dituntut untuk mengerjakan pekerjaan dengan menggunakan komputer dapat berjalan dengan baik. Mungkin kelemahan keterampilan inilah yang berpengaruh terhadap pengolahan data jika melibatkan kelurahan batu layang, namun juga ketidaklibatan Kelurahan Batu Layang oleh Badan Pusat Statistik berdampak ketidak tepat sasaran sehingga diperlukan kerjasama didalam koordinasi yang baik.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hasil wawancara yang sama juga dilakukan terhadap Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bapak (B) 45 tahun yang menyampaikan:

“kendaraan dinas yang ade 1 itu pun kurang, minimal 2 lah selain untuk lurah, kasi juga lah. Kalau gag salah ade penambahan, kalo gag salah pengajuan kemaren tu 2 kalo gag salah, 2 yang kite ajukan, disetujui atau gag kite gag tau. Kan dari kecamatan penggunaan anggaran itu. Minimal 1 kasi 1 komputer, kadang-kadang kalo mau make tu berebot jadi kalau kite mau melayani gimanalah? Gantian lah, itu jak utama. Minimal 1 kasi 1 komputer, minimal 1 kasi 2 staf. Banyak laporan yang harus dikerjakan”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara adalah ketersediaan fasilitas yang lengkap guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilapangan. Namun kenyataannya berdasarkan pengamatan dan

wawancara yang dilakukan, di Kelurahan Batu Layang memiliki fasilitas kendaraan dinas sebanyak 1 (satu) buah yang digunakan Lurah, dan 2 (dua) buah komputer, 1 (satu) komputer yang digunakan sekretaris dan 1 komputer untuk semua bidang sehingga secara bergantian untuk menggunakannya.

Selain itu juga ruangan Kantor Lurah yang terbatas terdiri dari ruangan kepala lurah, ruangan Sekretaris Kelurahan, ruangan staf dan ruangan khusus aula untuk menyimpan perlengkapan dan ruang tunggu. Sementara itu, staf yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dan kekurangan 5 (lima) buah kursi dan meja. Melihat hal tersebut, penulis merasa khawatir apabila tidak di benahi dan dilengkapi semua fasilitasnya akan berdampak terhadap kinerja dan keterampilan staf yang dimiliki Kelurahan Batu Layang, sehingga implementasi program Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM) akan berjalan tidak efektif dan efisien karena keterbatasan fasilitas untuk mendorong dan memaksimalkan mulai dari pendataan

dan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

3. Sikap Atau Disposisi Keberhasilan

Implementasi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak hanya ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara dan pihak Kelurahan sebagai pelaksana dilapangan, melainkan dipengaruhi juga oleh sikap masyarakat selaku kelompok sasaran atau target group yang akan menerima kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Lurah Batu Layang Bapak (HF) 48 tahun yang menyampaikan:

“ia... kalau kita membicarakan permasalahannya justru ada masalah karena banyak temuan. A... karena dalam hal ini lurah ni kan selaku kepala wilayah segala sesuatu apapun yang terjadi dimasyarakat tu sentralnya tu kan lurah, sehingga masyarakat langsung kelurah. A... karena ini kenapa? Karene ini dari pihak kelurahan tidak

merasa mendata karena ini sudah terdaftar dari statistik. A... ini yang kita sayangkan seharusnya itu tadi yang saya katakan tidak boleh sebenarnya. Sistem itu perlu kita reformasi lah sistem seperti itu libatkan seharusnya pihak kelurahan untuk pendataan, jadi a... jangan langsung dari statistik langsung yang mendata. Sementara kan ada temuan-temuan seperti ini iakan. Artinya kalau masalah sosialisasi kita lakukan, kita juga turut membantu, kita juga turut pro aktif, pastisipasi. Cuman ya karene ini sudah dari pusat artinya yang sudah terdaftar mw diapakan lagi iya kan. Kan itu artinya satu-satunya jalan dievaluasi, kita adakan pendataan ulang, kami mohon kepada pihak pemerintah pusat khususnya tolonglah hal ini, a... sistem ini kalau bisa diubah karena diwilayah kelurahan itu terus terang punya perangkat yang saya katakakan tadi RT dan RW. Saya rasa kalau itu dilibatkan semuanya berjalan lancar, walaupun ada temuan-temuan yan... walaupun ada itu paling 0, sekian persen ya... minimal”.

Selain itu, wawancara dilakukan Kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bapak (B) 45 tahun yang menyampaikan:

“harapan saya ini kalau dapat kartu balsem ini, BLSM ini, ini secara kontinue, kontinue dilakukan misalkan tahun 2013 tadi sudah dapat itu tiap bulannya ade misalnya 2 bulan dapatnya 300 kan, 4 bulan dapatnya 6 ratus kan, 1 bulan 150 kalau 2 bulan 300. Jadi ini secara kontinue jadi setiap tahunnya itu ade, geto. A... sedangkan orang yang membutuhkan juga ini kadang-kadang sering menanyakan kepada pihak kelurahan tapi kami ini kan Cuma sekedar pelaksana begitu informasi dari kantor pos ade, surat dari kantor pos memberi tahu kepada pihak kelurahan bahwa tahun ini ada balsem. BLSM ini keluar, kami memberitahulah kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan daftar tadi. A... kalau harapan saya ni a... kontinue secara berkelanjutan jangan sampai disini tahun 2013 stop a... 2014 da ada. Kemaren ade 14 orang dah banyak, kami belum ada ni sementara informasinya dari kantor pos belum ade jadi harapan saya ni

berkontinue jadi setiap tahunnya ade”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan terdapat hambatan dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dilakukan di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara yaitu sikap pihak penyelenggara seperti Pemerintah Pusat tidak melibatkan secara langsung pihak Kelurahan, akan tetapi memberikan tugas pendataan masyarakat miskin kepada Badan Statistik. Sistem 1 (satu) arah seperti ini akan berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), karena diperlukan kerjasama yang baik diantara kedua belah pihak mengingat dibutuhkan banyak Sumber Daya Manusia untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan tersebut. Apabila tidak terdapat kerjasama yang baik antara pihak Kelurahan dan badan pusat statistik maka data yang diperoleh akan tidak sesuai yang diharapkan, dalam kenyataannya ada beberapa masyarakat yang mengadu kepada pihak Kelurahan Batu Layang

yang menanyakan kenapa tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implemmentasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya antara Pemerintah Pusat dan Perangkat Kelurahan Batu Layang dalam pembagian tugas harus sesuai dengan prosedur, dengan demikian akan terjalin hubungan kerjasama antar perangkat daerah yang ada. Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi keadaan umum digunakan dalam organisasi publik. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para implementor dalam Pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Dengan adanya pembagian tugas, maka diberikan kewenangan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Seiring dengan pemberian kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas yang dimaksud, harus disertai tanggung jawab yang jelas dalam menentukan siapa yang pantas untuk diberikan wewenang merupakan suatu kebijakan atasan ataupun lembaga. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpangan dan kekurangan yang dapat terjadi, sehingga kebijakan tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan relevan sesuai fakta.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Kelurahan Batu Layang Bapak (HF) 48 tahun yang menyampaikan:

“ ia... kalau pembagian tugas sih sudah jelas sekali karena masing-masing seksi tu kan ade bidangnya masing-masing sesuai dengan tupoksi, umpamanya ade kasi pemerintahan itu membidangi pemerintahan, lalu ade kepala seksi trantib yaitu keamanan dan ketertiban. Itu memang ade tupoksinya masing-masing lalu

ekbang itu menangani ekonomi dan bangunan dan ape tupoksi lainnye juga lengkap jadi masing-masing itu sudah mempunyai tupoksinye masing-masing lengkap geto. ia... dalam hal ini kalau lurah itu prosedurnya, mekanismenya itu kita kan mempunyai atasan langsung yaitu SKPD kita yaitu adalah camat. Jadi koordinasi lurah itu, a... melanjutkan ketingkat kita dan seterusnya. Ia itu”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara sudah sangat jelas. Kelurahan sebagai ujung tombak untuk mengatasi permasalahan langsung dalam masyarakat memegang peranan penting, Kelurahan Batu Layang mempunyai Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sebagai mekanisme yang terstruktur supaya kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik. Pembagian tugas yang dijalankan tentunya terstruktur sesuai dengan tingkat atas ketingkat bawah seperti pemerintah yang diwakili Walikota meneruskan ke Kecamatan dan ke Kecamatan melanjutkan ke Kelurahan

sampai pada akhirnya ketingkat bawah yaitu RT dan RW.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Kesimpulan: Komunikasi dalam implementasi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Batu Layang sangat disayangkan tidak berjalan dengan efektif, efisien dan tidak tepat sasaran hal ini dikarenakan pihak Kelurahan tidak dilibatkan oleh badan pusat statistik dalam melakukan pendataan masyarakat miskin, melainkan menunjuk 4 (empat) orang mitra kerja untuk melakukan pendataan.

b. Sumber Daya

Kesimpulan: Kemampuan sumber daya dilihat dari jumlah staf secara umum belum tersedia dengan maksimal. Kemampuan dan keterampilan staf dalam mengoperasional komputer juga

perlu ditingkatkan, ketersediaan fasilitas yang terbatas menjadi faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di Kelurahan Batu Layang termasuk pendataan penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Selain itu juga sumber pendanaan yang perlu untuk menambah penggunaan anggaran supaya memaksimalkan kinerja staf di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.

c. Sikap Atau Disposisi

Kesimpulan: Kecenderungan sikap implementor dan target group sudah dapat dikatakan cukup baik, terlihat dari dukungan kepala Kelurahan dan staf-staf beserta masyarakat di Kelurahan Batu Layang untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dengan efektif dan efisien.

d. Struktur Birokrasi

Kesimpulan: Pembagian tugas dalam struktur birokrasi

Kelurahan Batu Layang sudah cukup jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, akan tetapi tidak adanya kerjasama yang baik antara pihak Kelurahan Batu Layang dengan badan pusat statistik dalam pembagian tugas pendataan, menjadi hambatan untuk menentukan kelompok sasaran penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, perlu membangun koordinasi yang baik dengan menjalin kerjasama diantara Pemerintah Pusat, Pusat Badan Statistik, pihak Kelurahan dan Masyarakat sebagai target group. Dengan demikian, kebutuhan dan keinginan masyarakat Batu Layang akan terpenuhi dan tujuan kebijakan

dapat berjalan dengan efektif, efisien dan dapat tepat sasaran.

- b. Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, perlu mengusulkan penambahan anggaran karena untuk memenuhi semua sumber daya diperlukan anggaran yang cukup. Penambahan jumlah staf, bukan hanya dari segi jumlah melainkan kualitas yang harus dimiliki sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi. Selain itu juga, perlu adanya penambahan fasilitas seperti kendaraan dinas, komputer, kursi dan meja, apabila keseluruhan sumber daya dipenuhi akan berpengaruh terhadap kinerja yang efektif dan efisien.

- c. Sikap harapan dan dukungan dari pada implementor dan target sasaran perlu ditingkatkan lagi. Supaya respon mereka dapat mendorong pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

- d. Saran: Pembagian tugas kepada pihak Kelurahan Batu Layang harus jelas dan tegas karena Kelurahan Batu Layang memiliki perangkat RT dan RW yang dapat melakukan kerjasama pendataan dilapangan.

F. REFERENSI

Buku-Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : IYANSEP
 NIM / Periode lulus : E21110050 / 2014
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / IAN
 E-mail address/HP : Selvinusyan1992@gmail.com / HP 082251077086

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....IAN..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PENCIINTEGRASIAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
 SEMENTARA MASYARAKAT (BSM)

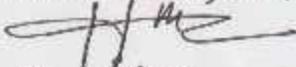
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

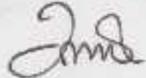
- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal 30-3-2015

Dr. Arifin
 NIP. 197205020247021002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 30 Maret 2015

 (IYANSEP)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).